



PROFIL



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2022**

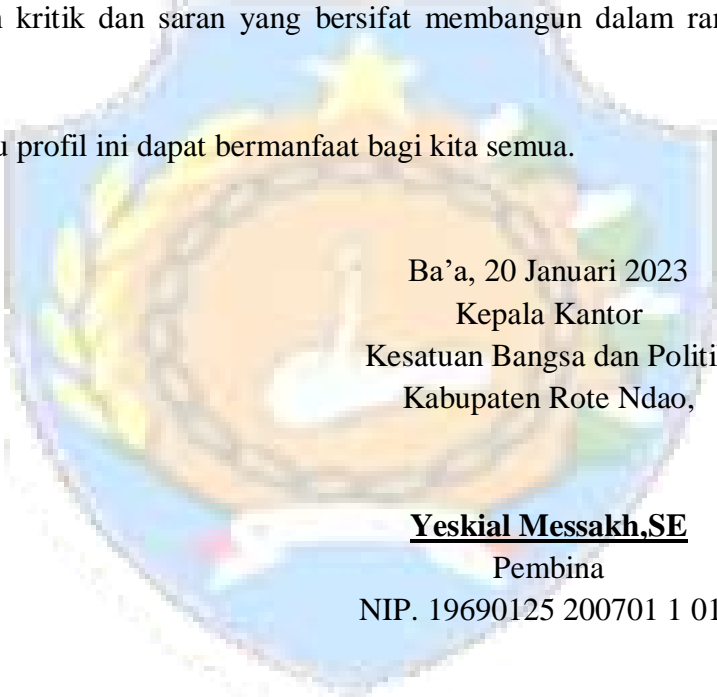
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan Buku Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 merupakan produk dan bentuk kontribusi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao kepada Pemerintah melalui Misi ke-4 Bupati Rote Ndao yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima. Buku ini diharapkan mampu menjelaskan dengan memberikan informasi tentang seluruh transpaasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Rote Ndao.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada buku profil ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan untuk yang akan datang.

Semoga buku profil ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Ba'a, 20 Januari 2023
Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao,

Yeskial Messakh,SE
Pembina
NIP. 19690125 200701 1 017

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	1
	C. Sasaran.....	1
BAB II	GAMBARAN UMUM KAB. ROTE NDAO	2
	A. Geografis	2
	B. Topografi	4
	C. Klimatologi	4
	D. Demografi	5
BAB III	GAMBARAN UMUM KANTOR KESBANGPOL	6
	1. Foto dan Alamat	6
	2. Struktr Organisasi	7
	3. Nama-nama Pejabat Struktural	7
	4. Data Pegawai	8
	5. Uraian Tugas Jabatan Struktural	10
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN	17
	1. Program dan Kegiatan Tahun 2020	17
	2. Rincian Program dan Kegiatan	18
	3. Capaian Program dan Kegiatan	18
BAB V	PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Luas Wilayah	3
Tabel 2	:	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	5
Tabel 3	:	Nama-nama Pejabat Struktural	7
Tabel 4	:	Rekapitulasi Analisis Beban Kerja.....	9
Tabel 5	:	Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural.....	10
Tabel 6	:	Program dan Kegiatan	10
Tabel 7	:	Capaian Program dan Kegiatan	18
Tabel 8	:	Data Parpol yang memperoleh kusi DPRD, Jumlah Suara dan total perolehan kursi pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.....	21
Tabel 9	:	Jumlah Dana Bankeu TA.2021.....	23
Tabel 10	:	Data Ormas/LSM yang terdaftar di Kantor Kesbangpol Tahun 2019-2022.....	24
Tabel 11	:	Data jumlah orang asing yang berkunjung di Kabupaten Rote Ndao sebagai wisatawan Mancanegara Tahun 2017-2022.....	25
Tabel 12	:	Jumlah tempat Ibadah Menurut Kecamatan.....	26
Tabel 13	:	Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Agama.....	27
Tabel 14	:	Data Suku/Etnis di Kabupaten Rote Ndao.....	27
Tabel 15	:	Data Sanggar Seni Budaya di Kabupaten Rote Ndao.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Peta Wilayah	2
Gambar 2	:	Luas wilayah menurut Kecamatan	3
Gambar 3	:	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin....	5
Gambar 4	:	Partai peserta Pemilu Legislatif tahun 2019 & jumlah perolehan kursi di DPRD.....	22
Gambar 5	:	Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2017-2022.....	25



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu Organisasi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Profil Kesbangpol merupakan salah satu produk dari Sistem Informasi Keatuan Bangsa dan Politik yang penyusunan dan penyajiannya dibuat sesederhana mungkin tetapi informatif, untuk dipakai sebagai alat tolok ukur kemajuan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus juga sebagai bahan evaluasi program-program Kesbangpol. Profil Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao adalah gambaran situasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat berbagai data tentang situasi dan hasil pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik selama satu tahun yang memuat data perkembangan partai politik di Kabupaten Rote Ndao, Perkembangan Organisasi Masyarakat, Data Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Forum Kewaspadaan Dini Daerah dan capaian indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan buku profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah:

1. Memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan program dan kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Menyediakan data dan informasi tentang Program dan Kegiatan yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote.

C. SEJARAH SINGKAT PERANGKAT DAERAH

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu Organisasi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

GAMBARAN PENAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai ketentuan pasal 88 Peraturan Bupati dimaksud, maka ditetapkan bahwa Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok : **“Membantu Bupati Dalam Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas atau fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. FISI DAN MISI KABUPATEN ROTE NDAO

“Terwujudnya masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT dan berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan.

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk mewujudkan visi yang dikemukakan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote

Ndao tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, dibutuhkan sekmentasi target-target antara lain diuraikan dalam bentuk MISI sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualistas Sumber daya Manusia Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

B. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai ketentuan pasal 88 Peraturan Bupati dimaksud, maka ditetapkan bahwa Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok : **“Membantu Bupati Dalam Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”**.

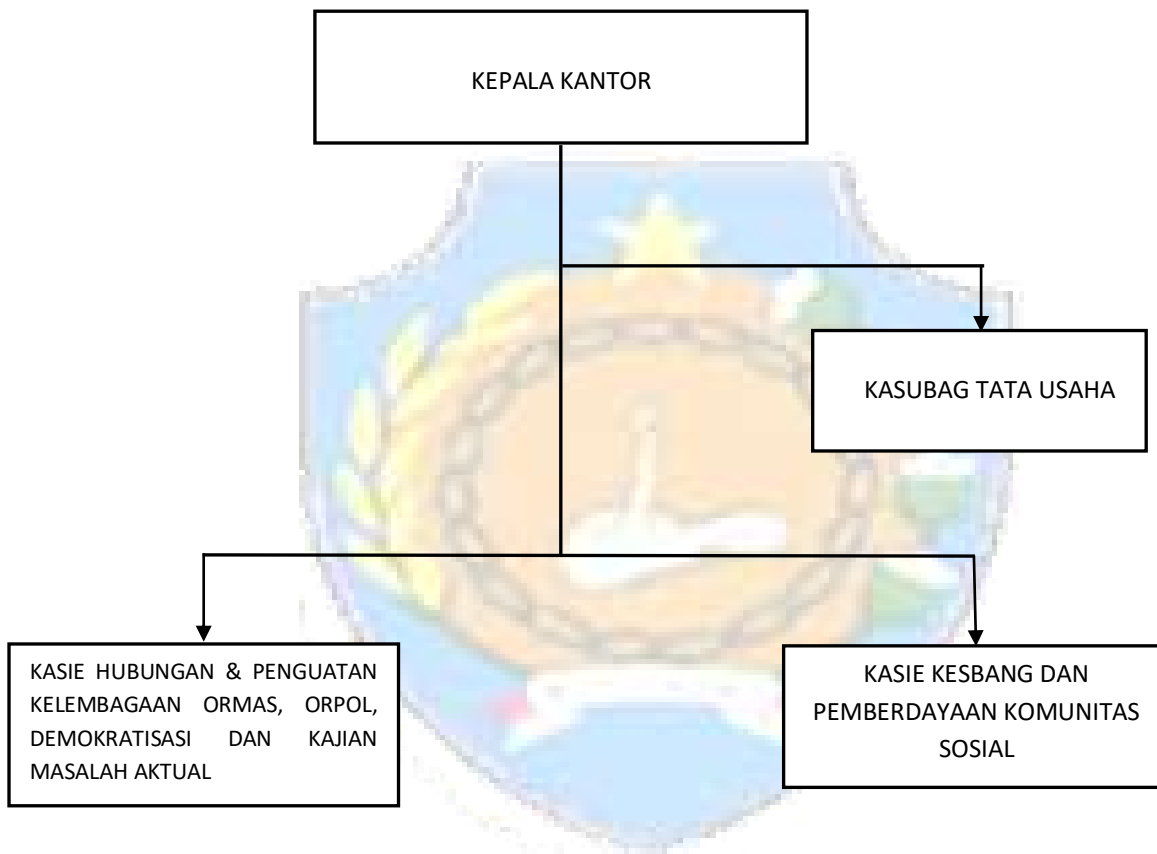
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

7. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.
10. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;

12. Pelaksanaan tugas atau fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :

1) Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Kantor mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kantor dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan dan menetapkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pilihan/unggulan secara tepat pada Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Menyelenggarakan, mendorong, mengawasi dan memberikan motivasi dan rangsangan kerja kepada personil untuk bersama-sama memajukan Kantor agar terciptanya kesamaan persepsi dan ikut sertanya seluruh staf dalam pelaksanaan tugas;
5. Menyiapkan bahan bagi penyusunan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang berbasis kinerja agar tersedianya SDM yang berkompetensi;
6. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang perlindungan masyarakat meliputi kesiapan terhadap ancaman dan bencana, penyelamatan dan bencana, rehabilitasi akibat bencana serta peningkatan SDM satuan perlindungan masyarakat di daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan dan peraturan operasional yang menyangkut kesatuan bangsa bersama instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik
8. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi dan

- koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis;
 10. Melakukan pembinaan dan memotivasi bawahan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk peningkatan produktivitas dan karier aparatur yang berbasis kinerja;
 11. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi dan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 12. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya kerja, Pengawasan melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan Kinerja keuangan dan laporan kinerja badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 13. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi dan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 14. Mengadakan rapat staf secara rutin dan berkala untuk meningkatkan produktivitas kerja;
 15. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik.

2) Kasubag Tata Usaha

Kasubag Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tata Usaha mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional kegiatan ketatausahaan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan pelayanan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, tata usaha mempunyai tugas

sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana kerja kantor dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk penyempurnaan lebih lanjut;
4. Mengontrol pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
5. Melakukan penyusunan rencana program/kegiatan kantor berdasarkan masukan data dari seksi di lingkungan kantor agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
7. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud aparatur yang handal dan memiliki kompetensi;
8. Mengontrol pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
9. Mengontrol penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, AKIP, kinerja kantor, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
10. Mengontrol pelaksanaan tugas melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
11. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan

maupun tulisan dalam rangka pelaksanaan tugas.

3) Kasie Hubungan Penguatan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan kajian masalah aktual

Seksi Hubungan Penguatan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan kajian masalah aktual membantu kepala kantor dalam Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Hubungan Dan Penguatan Kelembagaan, Ormas, Orpol, Demokratisasi dan Kajian Masalah-Masalah Aktual Melalui Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Bidang Kesbangpol dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi Hubungan dan Penguatan Kelembagaan, Ormas, Orpol, Demokratisasi dan Kajian Masalah-Masalah Aktual berdasarkan langkah-langkah operasional kantor dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Merencanakan perumusan kebijakan dan pengembangan pedoman Hubungan Dan Penguatan Kelembagaan, Ormas, Orpol, Demokratisasi dan Kajian Masalah-Masalah Aktual untuk dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi dan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Mengadakan rapat staf secara rutin dan berkala untuk meningkatkan produktivitas kerja;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik.

4) Kasie Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Komunitas Sosial

Seksi Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Komunitas Sosial membantu kepala kantor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kesatuan bangsa dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial melalui Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesbangpol dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial berdasarkan langkah-langkah operasional kantor dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya;
4. Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial agar tersedia data dasar yang diperlukan;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial yang terencana agar kegiatan dapat berjalan sesuai program;
6. Menyusun data kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial melalui analisa data untuk meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan komunitas suku adat maupun kelompok komunitas lain yg ada di masyarakat agar diberdayakan;
7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan hubungan kesatuan bangsa, asimilasi antar suku dan hidup beragama serta pemberdayaan kelompok komunitas sosial di masyarakat agar terciptanya kehidupan yang rukun antar sesama warga dan meningkatnya taraf hidup kelompok masyarakat;

- 8 Melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi dan permasalahan aktual yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial agar tersedia data dan informasi yang lengkap dan akurat.

D. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu perangkat daerah, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut.

Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao memiliki pegawai sebanyak 10 orang. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, struktur kepegawaian, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

2. Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja

E. SUMBER DAYA MODAL / ASET

Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Kendaraan Roda Empat	2006	1	Baik
Kendaraan Roda Dua	2006	1	Rusak
	2014	1	Baik
	2018	1	Rusak
	2019	1	Baik
	2019	1	Baik
Meja kerja /Biro	2013	1	Baik
Meja Kerja	2014	1	Baik
Meja kerja	2016	20	Baik
Meja Kerja/Biro	2004	7	Kurang Baik
Meja Kerja/ Biro	2007	2	Kurang Baik
Sofa	2007	1	Kurang Baik
Kursi Kerja	2004	9	Kurang Baik
Mesin Gergaji	2009	1	Rusak Berat

Kunci Pas satu set	2009	1	Tidak Ada
Rak Kayu	2006	1	Kurang Baik
Rak Kayu	2014	1	Baik
Brand Kas	2006	1	Baik
White Board	2011	3	Baik
Lemari Kayu	2004	2	Kurang Baik
Lemari Kayu	2013	2	Baik
Rak Kayu	2019	1	Baik
Meja Kayu Rotan	2007	1	Kurang Baik
Kursi Jok Tinggi	2014	3	Baik
Kursi kerja	2004	1	Kurang Baik
Kursi Kerja	2016	20	Baik
Gordin	2017	40	Baik
AC/Samsung	2016	4	Baik
AC /Sharp	2019	1	Baik
Tandom air	2017	1	Baik
Masker Oksigen	2009	50	Baik
Selang penyemprot air/ polyester	2008	2	Kurang Baik
Selang penyemprot air/fire house	2016	1	Baik
PC UNit/Komputer PC	2018	1	Baik
Laptop/ Sony	2014	2	Baik
Laptop / Lenovo	2017	2	Baik
Laptop/Lenovo	2018	1	Baik
Laptop/Acer	2019	2	Baik
Printer Broder	2014	3	Baik
Printer Canon Prima	2016	2	Baik
Printer Canon Pixma	2018	1	Baik
Printer Canon Pixma	2019	2	Baik
Camera+ Atadment	2018	1	Baik

Proyektor+ Atchment	2019	1	Baik
Mikropone/Warles Mic/Toa	2006	1	Kurang Baik
Ac/Panasonic	2021	1	Baik
Kursi Tamu/Stailness	2021	2	Baik
Laptop/Acer	2021	2	Baik
Printer/Canon	2021	3	Baik
Kursi Plastik/Napolly	2021	46	Baik
Gorden	2021	40	Baik
Besi Gorden	2021	82	Baik
Handy Cam Sonny	2018	1	Baik
Mantel	2009	13	Rusak Berat
Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Mantel	2009	37	Baik
Teropong	2008	1	Baik
Bangunan Gedung Kantor Parmanen	2006	2	Baik
Bangunan Gedung Tertutup Parmanen	2008	1	Baik
Bangunan Gedung instalasi lain-lain	2007	1	Kurang Baik
Pos Jaga Parmanen	2007	1	Kurang Baik
Pos Jaga Parmanen	2008	1	Kurang Baik
Bangunan Gedung Grasi/Pol lain-lain	2008	1	Baik
Jaringan ke sambungan Rumah kapasitas kecil	2019	1	Baik
Jaringan Transmisi Lain-lain	2017		Kurang Baik

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2022

BAB III

PEMBAHASAN

A. ADMINISTRASI

1. RENSTRA

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 -2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao . Rencana Strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang di sesuaikan dengan pagu indikatif , sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. RENJA

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan .

Rencana Strategis merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang di sesuaikan dengan pagu indikatif , sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Kantor kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rote Ndao kedepannya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja ini juga merupakan salah satu kegiatan untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (Good Government Governance).

Rancangan Awal Renja Tahun 2023 disajikan secara obyektif tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka pendek bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik .


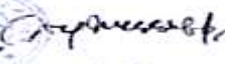
Rancangan Akhrit Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga kami berharap untuk mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja ini dimasa mendatang.

3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini	1.1. Cakupan Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan	100%
1.2. Persentase Ormas/LSM yang dibina		100%	
1.3. Presentase Partai Politik yang diverifikasi		100%	
1.4. Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		100%	



4. SOP

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP - Ap	KKBP.065/10/Kab. RN/XII/2019
	Tanggal Pengesahan	20 Desember 2019
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao</p>  <p style="text-align: center;">Yeskial Messakh, SE NIP. 19690125 200701 1 017</p>
	Nama SOP - AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dasar Hukum :		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;		1. Pendidikan minimal SMA/SMK
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;		2. Memahami Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;		3. Memahami Tata Naskah Dinas
6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Plaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.		
Keterkaitan :		Peralatan/ Perlengkapan
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)		1. Komputer
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)		2. ATK
		3. Jaringan Intrenet
		4. Lembar Kerja, Rencana Kerja, Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan
Penyusunan LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao		Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mula Mula	Waktu	Output	Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Perencana				
1.	Memerintahkan Kasubag Tata Usaha untuk mempersiapkan konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor	Mulai			Kelengkapan	15 Menit	Dispensi	
2.	Memerintahkan Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mengumpulkan bahan penyusunan laporan dari tiap-tiap seksi/sub bagian dan menyusun konsep LKIP Kantor				Dispensi	15 Menit	Dispensi	
3.	Mengumpulkan bahan penyusunan laporan dari tiap-tiap seksi/sub bagian dan menyusun konsep LKIP Kantor				Bahan laporan dan Konsep LKIP	1 Hari	Konsep LKIP	
4.	Meneliti dan menelaah konsep LKIP jika setuju maka diparaf jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk diperbaiki				Konsep LKIP	1 Hari	Konsep LKIP	
5.	Meneliti dan menelaah LKIP yang telah diparaf oleh Kasubag Tata Usaha jika setuju maka ditandatangani jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki	Ya	Tidak		Konsep LKIP	2 Jam	Dokumen LKIP	
6.	Mengembangkan LKIP, Mengembangkan dan Mendistribusi				Draf Laporan	10 Menit	LKIP	
7.	Mengirimkan Dokumen Laporan LKIP.				LKIP	10 Menit	Laporan LKIP, tanda terima	

5. JADWAL KEGIATAN PERTAHUN

6. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

B. TRANSPRANSI KEUANGAN

1. RKA/DPA



C. DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPPA-BELANJA SKPD															
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022																				
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah							Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) <small>^{14 =} <small>(10+11+12+13)</small></small>	Belanja Operasi	Belanja Modal			Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) <small>^{19 =} <small>(15+16+17+18)</small></small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																				
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.232.193.750	0	0	0	2.232.193.750	2.232.192.950	0	0	0	2.232.192.950	(800)	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.104.091.100	0	0	0	1.104.091.100	1.107.884.300	0	0	0	1.107.884.300	3.793.200	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	

8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				727.669.000	0	0	0	727.669.000	727.669.000	0	0	0	727.669.000	0
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		652.679.000	0	0	0	652.679.000	652.679.000	0	0	0	652.679.000	0
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		74.990.000	0	0	0	74.990.000	74.990.000	0	0	0	74.990.000	0
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.800.000	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
8	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		4.800.000	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				238.022.900	0	0	0	238.022.900	238.022.900	0	0	0	238.022.900	0	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		5.200.000	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	0	0	5.200.000	0	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.999.000	0	0	0	24.999.000	24.999.000	0	0	0	24.999.000	0	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		19.965.900	0	0	0	19.965.900	19.965.900	0	0	0	19.965.900	0	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		187.858.000	0	0	0	187.858.000	187.858.000	0	0	0	187.858.000	0	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.474.200	0	0	0	17.474.200	21.267.400	0	0	0	21.267.400	3.793.200	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		1.495.000	0	0	0	1.495.000	1.495.000	0	0	0	1.495.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8		9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18		
8	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		15.979.200	0	0	0	15.979.200	19.772.400	0	0	0	19.772.400	3.793.200	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.125.000	0	0	0	41.125.000	41.125.000	0	0	0	41.125.000	0		
8	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		38.633.000	0	0	0	38.633.000	38.633.000	0	0	0	38.633.000	0	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		2.492.000	0	0	0	2.492.000	2.492.000	0	0	0	2.492.000	0	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			620.608.000	0	0	0	620.608.000	620.608.000	0	0	0	620.608.000	0		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			620.608.000	0	0	0	620.608.000	620.608.000	0	0	0	620.608.000	0		
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		565.608.000	0	0	0	565.608.000	565.608.000	0	0	0	565.608.000	0	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale		55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			50.000.000	0	0	0	50.000.000	46.206.000	0	0	0	46.206.000	(3.794.000)		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			50.000.000	0	0	0	50.000.000	46.206.000	0	0	0	46.206.000	(3.794.000)		

8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	46.206.000	0	0	0	46.206.000	(3.794.000)
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			292.330.000	0	0	0	292.330.000	292.330.000	0	0	0	292.330.000	0	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						14 = (10+11+12+13)					19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21					
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						292.330.000	0	0	0	292.330.000	292.330.000	0	0	0	292.330.000	0	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				292.330.000	0	0	0	292.330.000	292.330.000	0	0	0	292.330.000	0	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						165.164.650	0	0	0	165.164.650	165.164.650	0	0	0	165.164.650	0	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						165.164.650	0	0	0	165.164.650	165.164.650	0	0	0	165.164.650	0	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				111.344.900	0	0	0	111.344.900	111.344.900	0	0	0	111.344.900	0	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				53.819.750	0	0	0	53.819.750	53.819.750	0	0	0	53.819.750	0	

2. LKPI

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.104.091.100	1.107.884.300	3.793.200
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.000.000	30.000.000	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daer	20.000.000	20.000.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	0
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	727.669.000.-	727.669.000	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	652.679.000	652.679.000	0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.990.000	74.990.000	0
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.800.000	4.800.000	0
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	0
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.000.000	45.000.000	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45.000.000	45.000.000	0
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT	238.022.900	238.022.900	0

	DAERAH			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.200.000	5.200.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.999.000	24.999.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.858.000	187.858.000	0
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.474.200	21.267.400	3.793.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.495.000	1.495.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.979.200	19.772.400	3.793.200
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	41.125.000	41.125.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.633.000	38.633.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.492.000	2.492.000	0
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	620.608.000	620.608.000	0

<p>PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH</p>	620.608.000	620.608.000	0
<p>Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</p>	565.608.000	565.608.000	0
<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi</p>	55.000.000	55.000.000	0

Politik di Daerah			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	55.000.000	55.000.000	0
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	165.164.650	165.164.650	0
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	165.164.650	165.164.650	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	111.344.900	111.344.900	0
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	53.819.750	53.819.750	0

Kabupaten/Kota			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50.000.000	46.206.000	3.794.200
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50.000.000	46.206.000	3.794.200
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000	46.206.000	-3.794.200
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	292.330.000	292.330.000	0
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	292.330.000	292.330.000	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	292.330.000	292.330.000	0

	dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	TOTAL	2.232.193.750	2.232.192.950	800

3. LKIP

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
1.	BELANJA OPERASIONAL		-	-	-
2.	BELANJA OPERASIONAL		2.232.192.950	2.120.510.328	95,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.107.884.300	1.064.858.589	96,12
8.01.01.1	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.000.000	29.975.000	99,92
8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.995.000	99,98
8.01.01.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.000.000	9.980.000	99,80
8.01.01.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		727.669.000	687.648.693	94,50
8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		652.679.000	612.696.693	93,87
8.01.01.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan		74.990.000	74.952.000	99,95

		SKPD			
8.01.0 1	KEGIATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.800.000	4.800.000	100,00
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	100,00
8.01.0 1	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPAGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		45.000.000	45.000.000	100,00
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45.000.000	45.000.000	100,00
8.01.0 1	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		238.022.900	237.402.600	99,74
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.200.000	5.200.000	100,00
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.999.000	24.999.000	100,00
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.965.900	19.965.900	100,00
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	187.858.000	187.237.700	99,67

		Konsultasi SKPD			
8.01.01	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		21.267.400	19.154.296	90,06
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.495.000	1.494.500	99,97
	8.01.01.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.772.400	17.659.796	89,32
8.01.01	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		41.125.000	40.878.000	99,40
	8.01.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan	38.633.000	38.386.000	99,36
		n, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	8.01.01.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.492.000	2.492.000	100,00
8.01.03	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		620.608.000	602.975.789	97,16

8.01.0 3.2.01	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	620.608.000	602.975.789	97,16
8.01.03.2.0 1.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	565.608.000	548.953.789	97,06
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			

	8.01.03.2.0 1.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	55.000.000	54.022.000	98,22
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		46.206.000	44.755.100	96,86
	8.01.04.2.01	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	46.206.000	44.755.100	96,86

	8.01.04.2.0 1.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	46.206.000	44.755.100	96,86
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		292.330.000	290.810.000	99,48
8.01.05.2.01	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		292.330.000	290.810.000	99,48
8.01.05.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		292.330.000	290.810.000	99,48
8.01.06	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		165.164.650	117.110.850	70,91
8.01.06.2.01	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan		165.164.650	117.110.850	70,91

			Penanganan Konflik Sosial			
		8.01.06.2.0 1.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	111.344.900	108.697.000	97,62
		8.01.06.2.0 1.06	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dini, kerjasama Intelejen, Pemantauan orang asing tenaga kerja asing, dan lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, fasilitas	53.819.750	8.413.850	15,63

			kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik daerah			
TOTAL				2.232.193.950	2.120.510.328	95,00

4. LPPD

Program, Kegiatan, Realisasi Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebelum perubahan penjabaran APBD TA.2022 mendapat alokasi dana **Rp.2.232.193.750,-** setelah perubahan menjadi **Rp. 2.232.192.950,- realisasi Rp.2.111.796.598,-** atau **96,61 %** untuk melaksanakan Urusan Wajib Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

- a) Belanja Operasional sebesar **Rp. 602.679.000,-** realisasi **Rp.560.052.548,-** atau **96,70%.**
- b) Belanja Hibah sebesar **Rp.565.608.000,-** realisasi **Rp.548.953.789,-** atau **97,06%.**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Urusan Wajib Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 5 Program dan 11 Kegiatan:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.1.104.091.100,-** setelah perubahan menjadi **Rp. 1.107.884.300,-** realisasi **Rp.1.056.003.859,-** Atau **95,33%** meliputi kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.30.000.000,-** tidak mengalami perubahan realisasi Rp. **29.975.000,-** atau **99,92%.**
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Rp. 727.669.000,-** tidak mengalami perubahan, realisasi **Rp.687.507.678,-** atau **94,50%.**
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.4.800.000,-** tidak mengalami perubahan, realisasi **Rp.4.800.000,-** atau **100%.**
 - 4) Administrasi Kepegawaian Daerah dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.45.000.000,** tidak mengalami perubahan realisasi **Rp.36.250.000,-** atau **80,56%.**
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.21.267.400,-** tidak mengalami perubahan, realisasi **Rp.19.154.296,-** atau **89,32%.**
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp. 41.125.000,-** tidak mengalami perubahan realisasi **Rp.40.878.000,-** atau **75,81%.**

- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik** dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.620.608.000,-** setelah perubahan **Rp. 620.608.000,-** realisasi **Rp.602.975.789,-** atau **97,16%** terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.565.608.000,-** tidak mengalami perubahan realisasi **Rp.548.953.789,-** atau **97,06%**
 - 2) Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.55.000.000,-** tidak mengalami perubahan, realisasi **Rp.54.022.000,-** atau **98,22%**.
- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.165.164.650,-** tidak mengalami perubahan, realisasi **Rp.117.110.850,-** atau **70,91%** terdiri dari 2 kegiatan :
- 1). Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.111.344.900,-** tidak mengalami perubahan , realisasi **Rp.108.697.000,-** atau **97,62%**
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp.53.819.750,-** tidak mengalami perubahan, realiasi **Rp.8.413.450,-** atau **15,63%**
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** dengan alokasi dana sebelum perubahan **Rp. 50.000.000,-** setelah perubahan **Rp. 46.206.000,-** realisasi **Rp. 44.755.100,-** atau **98,86%**
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah** dengan alokasi

dana sebelum perubahan **Rp. 292.330.600,-** tidak mengalami perubahan, realisasi **Rp. 290.810.000,-** atau **98,86%** terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

Secara umum 5 (Lima) Program dan 13 (Tigabelas) Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 terlaksana dengan baik.



5. IKK



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jln. Lekunik Ba'a Website :

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUMDALAM
RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022

KABUPATEN : ROTE NDAO

NAMA SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	Aspek	Fokus	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket
						Urusan KESBANGPOL	Urusan KESBANGPOL	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Program Nasional (yang melekat di Kementerian/LPND yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	% Jml Program nasional yg dilaksanakan oleh OPD	(jml program nasional yg dapat dilaksanakan / jml program nasional (dalam RKP)	Jml Program Nasional yg dapat dilaksanakan sebanyak 3 Program. Jml program nasional (RKP) sebanyak 3 program	3:3 = 100%	
		Kesesuaian dengan Kebijakan teknis yg ditetapkan oleh pemerintah c/q Departemen/LPND	2	Keberadaan Standard Operatif Procedure (SOP)	Ada / Tidak Ada	Apabila Ada Sebanyak 2 yg terdiri dari 1. SOP Surat Menyurat 2. SOP Pelaksanaan Penyelesaian Sosial Secara Damai	Tidak Ada	
2	Ketaatan thd Peraturan Perundang-undangan	Jml PERDA yang hrs dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yg ada terhadap PERDA yg hrs dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yg ada dibagi jumlah PERDA yg harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 0 PERDA yg seharusnya sebanyak 0	0%	
3	Penataan Kelembagaan Daerah	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering Yang Terisi	Jml Jabatan yg ada (yg diisi) dibagi jml jabatan yg harus ada x 100 %	Jabatan yg terisi sebanyak 3 jabatan	3:3 x 100% = 100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dlm struktur Organisasi OPD	Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jabatan yg harus ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Tidak Ada	

NO	Aspek	Fokus	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket
						Urusan KESBANGPOL	Urusan KESBANGPOL	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Tingkat Kompetensi SDMDalam Menyelenggarakan Tugas OPD yg Relevan Dengan Urusan Terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jml PNS OPD terhadap total PNS Kabupaten	PNS yg Menangani Urusan Pemerintahan Sebanyak 9 Total PNS Kab. Rote Ndao 3168	9:3168 = 0,04 %	
			7	Rasio pejabat yg telah memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepangkatan	Jml Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Kepemimpinan dibagi Jml total Pejabat OPD yg ada x 100 %	Pejabat yg memenuhi syarat Diklat Pim sebanyak 2 Orang Pejabat yg ada sebanyak 2 orang	2:2x 100%= 100%	
			8	Rasio Pejabat yg telah memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepangkatan	Jml Pejabat yg memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jml total pejabat OPD yg ada x 100 %	Pejabat yg memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 2 Orang Pejabat yg ada sebanyak 2 Jbatan	2:2x 100%= 100%	
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yg dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD * RENSTRA OPD * RENJA OPD * RKA OPD * DPPA OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Apabila ada sebutkan dokumen yg ada Tahun 2021, sebanyak 3 Dokumen yg terdiri dari : * RENSTRA OPD * RENJA OPD * RKA OPD * DPPA OPD	Ada	
		Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jml program RKPD yg diakomodir dlm RENJA SKPD	Jml program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jml program dlm RENJA OPD yg ditetapkan pada RPJMD x 100 %	Program RKPD yg diakomodir dlm RENJA SKPD sebanyak 5 Program Program RENJA OPD yg ditetapkan dlm RPJMD sebanyak 5 Program	5:5 x 100%= 100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD	11	Jml program RENJA RKPD yg diakomodir dalam RKA OPD	Jml program RENJA RKPD yg diakomodir dalam RKA OPD dibagi jml program dlm RKA OPD x 100 %	Program RKPD yg diakomodir dalam RENJA OPD sebanyak 5 Program Program dalam RKA OPD sebanyak 5 Program	5:5 x 100%= 100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jml program RENJA yg diakomodir dalam DPA OPD	Jml Program RENJA OPD yg diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jml program dalam DPA OPD x 100%	Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD sebanyak 5 Program Program dalam DPA OPD sebanyak 5 Program	5:5x 100%= 100%	

NO	Aspek	Fokus	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket
						Urusan KESBANGPOL	Urusan KESBANGPOL	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi anggaran	1 3	Realisasi Belanja OPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja OPD dibagi total APBD x 100%	Total realisasi belanja OPD sebesar Rp. 2.111.655.313 Total belanja APBD sebesar 2,111,655,313	100.00%	
		Besaran Belanja Modal	1 4	Belanja Modal terhadap total belanja OPD	Belanja Modal dibagi total belanja OPD x 100 %	Belanja Modal OPD sebesar Total Belanja OPD sebesar	-	
		Besaran Belanja Pemeliharaan	1 5	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa OPD x 100%	Total Belanja pemeliharaan OPD sebesar Rp. 40,878,000 Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp. 858,643,000	4.76%	
			1 6	Total belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100 %	Total Belanja pemeliharaan OPD sebesar Rp. 41,125,000 Total Belanja OPD sebesar 41,125,000	100	
			1 7	Belanja Hibah	Total Belanja Hibah Parpol dibagi Total Belanja OPD x 100	Total Belanja Hibah Parpol 565,608,000 Total Belanja Hibah OPD 548,953,789	97.05%	
		Laporan Keuangan OPD	1 8	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, Calk, LRA)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (Neraca, Calk, LRA)	Tidak ada/ Ada sebanyak 3 jenis yakni : (Neraca, Calk, LRA)	Ada	
7	Pengelolaan Barang milik Daerah	Manajemen aset OPD	1 9	Keberadaan inventarisasi barang atau aset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset OPD	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya 1. KIB 2. KIR 3. Dst	Ada	
		Penggunaan Aset SKPD	2 0	Jml yg tidak digunakan oleh OPD	Jml aset yg tidak digunakan OPD dibagi total aset yg dikuasai OPD x 100 %	Aset yg tidak digunakan Aset yg dikuasai OPD 2,722,577,360	0.00%	

NO	Aspek	Fokus	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket
						Urusan KESBANGPOL	Urusan KESBANGPOL	
1	2	3	4	5	6	7	8	
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	Bentuk-bentuk Fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	2 1	Jml fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Informasi 2. Banner	Jml fasilitas / prasaranapartisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi 2. Banner	Ada Ada	
		Responsifitas terhadap partisipasi masyarakat	2 2	Keberadaan Survey Kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada. Sebutkan surveykepuasan tentang : 1. Survei Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Organisasi 2. Survei Pelayanan Administrasi Dana Hibah Parpol	Ada	

Baa, 15 Januari 2023

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao

Yeskial Messakh, SE

NIP.19690125 200701 1 017

LAMPIRAN IKK III.3

KABUPATEN : ROTE NDAO

NAMA SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	Urusan	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah	2 Kegiatan	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5 Kegiatan	

Baa, 15 Januari 2023
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao

Yeskial Messakh,SE

NIP.19690125 200701 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'I Langga Permai Jln. Lekunik Ba'aWebsite :
www.rotendaokab.go.id

KABUPATEN : ROTE NDAO

NAMA SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAFTAR KEGIATAN IKK.III.3

NO	IKK	Nama Kegiatan
1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	1 Rapat Koordinasi Kessatuan Bangsa dan Politik 2 Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Partai Politik
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 Peningkatan Kerjasama Pemantauan Aktifitas Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah 2 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 3 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 4 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 5 Penguatan Kelembagaan Organisasi

Baa,15 Januari 2023

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
dan PolitikKabupaten Rote Ndao

YESKIAL MESSAKH,SE

NIP. 19690125 200701 1 017

6. LAPORAN KEUANGAN

C. INOVASI PERANGKAT DAERAH



BAB IV

PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah: pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/kota lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TAHUN 2022

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	(Rp)
1					2	3	
8	01	01			PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1,107,884,300
8	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20,000,000
8	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen profil OPD, RKT, PK, Rencana Aksi Kinerja, LKIP, LKPJ, LPPD dan	10,000,000
8	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	652,679,000
8	01	01	202	03	Pelaksanaan dan penatausahaan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya honor pengelola APBD dan tersedianya lembur bagi pengelola APBD	74,990,000
8	01	01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya Honor Pengelola BMD	4,800,000
8	01	01	205	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Tersedianya tenaga kontrak daerah	45,000,000
8	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	5,200,000
8	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	
8	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	19,965,900
8	01	01	206	07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan jasa kebersihan kantor	24,999,000
8	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi ,konsultasi SKPD dan terlaksananya koordinasi sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	187,858,000
8	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat ,	1,495,000
8	01	01	208	02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	19,772,400
8	01	01	209	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	38,633,000
8	01	01	209	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	2,492,000

2. PROGRAM KEGIATAN BIDANG

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	(Rp)
1					2	3	
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Meningkatnya Peran Partai Politik	620,608,000
8	01	03	201	03	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan, pemerintahan, perwakilan dan partai politik , emilian umum/ pemilihan umum kepaala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Terlaksananya penelitian pemeriksaan kelengkapan administrasi Partai Politik	565,608,000

8	01	03	201	05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan, pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Tersedianya rekomendasi bantuan keuangan partai politik	55,000,000
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Tertatanya kelembagaan Ormas	46,206,000
8	01	04	201	03	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Tertatanya kelembagaan Ormas	46,206,000
8	01	05			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	292,330,000
8	01	05	201	04	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi -instansi terkait, koordinasi etnis, koordinasi FKUB, Koordinasi FKD, FKDM dan FPK, tersedianya tim terpadu P4GN,	292,330,000
8	01	06			Program : Peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan nasional, kualitas fasilitasi penanganan konflik sosial	165,164,650
8	01	06	201	04	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini intelegen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitasi kelembagaan bidang serta penanganan konflik di daerah	Terlaksananya pemantauan aktivitas orang asing di daerah	111,344,900
8	01	06	201	05	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelegen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik sosial di daerah	Terlaksananya Rapat evaluasi Rencana Aksi B 04 (April) B 08 (Agustus) dan B 012 (Desember) Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah	53,819,750
							2,232,192,950



BAB VI PENUTUP

1. KESIMPULAN.

Substansi Bidang Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berhubungan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta implementasi kebijakan publik di bidang politik dan demokrasi. Data Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 kiranya dapat memberikan gambaran singkat tentang capaian kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 guna penyusunan kebijakan daerah dan sebagai dasar bagi pendataan lainnya.

Selanjutnya data profil ini akan disajikan secara berkala setiap tahunnya untuk melihat perkembangan capaian kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Rote Ndao.

Data dan informasi sangat diperlukan bagi para pemangku kebijakan dan perencana pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik di segala tingkat administrasi. Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao ini menjadi paket sajian data dan informasi yang sangat penting dan dapat digunakan baik oleh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik, lintas sektor, maupun masyarakat. Namun disadari pula bahwa data dan informasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang disediakan dalam profil ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan berbagai pihak. Walaupun demikian, diharapkan Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao ini tetap dapat memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang kondisi pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Rote Ndao serta dapat digunakan sebagai media untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan data dan informasi hasil pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 yang dilaporkan, dapat disimpulkan bahwa indikator Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Rote Ndao adalah:

1. Persentase Partai Politik yang diverifikasi
2. Persentase Ormas/LSM yang dibina
3. Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
4. Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi

Dalam rangka mencapai indikator Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Rote Ndao, sudah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai Indikator Kinerja Utama, yang hasilnya sebagai berikut:

1. Persentase Partai Politik yang diverifikasi :100%
2. Persentase Ormas/LSM yang dibina: 100%
3. Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan : 100%
4. Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi : 100%

2. SARAN

Berbagai perbaikan dan upaya untuk mencapai status Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilaksanakan secara maksimal. Demikianlah penyajian Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao,

YESKIAL MESSAKH,SE

Pembina

NIP. 19690125 200701 1017

